

**PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Jakarta, 30 Nopember 2017

**BIDANG** : BUMN/BUMD**LEMBAGA** : PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : BAMBANG SUKARNO  
2. Jabatan : MANAGER - TRACK ASSET - EVP RAILWAY ASSET  
3. NIK : 147122  
4. Tanggal Pelaporan : 21 Desember 2015, 8 Agustus 2016

**Status Laporan****II. DATA HARTA****A. HARTA TIDAK BERGERAK  
(TANAH DAN BANGUNAN)**

1. Tanah & Bangunan seluas 185 m2 & 175 m2, di Kota BANDUNG, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 1993 sampai dengan 1996  
2. Tanah & Bangunan seluas 215 m2 & 200 m2, di Kota BANDUNG, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 2010 sampai dengan 2012 (Perubahan Atas Data yang dilaporkan sebelumnya)

**B. HARTA BERGERAK****a. ALAT TRANSPORTASI  
DAN MESIN LAINNYA**

	21 Desember 2015	8 Agustus 2016
	Rp. 460.620.000	Rp. 460.620.000
	Rp. 249.345.000	Rp. 249.345.000
	Rp. 211.275.000	Rp. 211.275.000
	Rp. 105.000.000	Rp. 105.000.000

	21 Desember 2015	8 Agustus 2016
1. Mobil, merk SUZUKI APV, tahun pembuatan 2008, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2008	Rp. 90.000.000	Rp. 90.000.000
2. Motor, merk SUZUKI SATRIA FU, tahun pembuatan 2009, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2009	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000
<b>b. PETERNAKAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, KEHUTANAN, PERTAMBANGAN DAN USAHA LAINNYA</b>	----	----
<b>c. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	----	----
<b>C. SURAT BERHARGA</b>	Rp. 0	Rp. 0
<b>D. GIRO DAN SETARA KAS LAINNYA</b>	Rp. 31.284.479	Rp. 31.284.479
1. Yang berasal dari HASIL SENDIRI	Rp. 31.284.479	Rp. 31.284.479
<b>E. PIUTANG</b>	Rp. 0	Rp. 0
<b>TOTAL HARTA (II)</b>	Rp. 596.904.479	Rp. 596.904.479
<b>III. HUTANG</b>	Rp. 125.637.790	Rp. 125.637.790
1. Hutang dalam bentuk PINJAMAN UANG	Rp. 49.999.990	Rp. 49.999.990
2. Hutang dalam bentuk PINJAMAN BARANG	Rp. 75.637.800	Rp. 75.637.800
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II - III)</b>	Rp. 471.266.689	Rp. 471.266.689

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai dengan yang dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dan tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis